

Judul : Ayo, Berantas Mafia Pupuk
Tanggal : Sabtu, 05 Februari 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Ayo, Berantas Mafia Pupuk

Senayan meminta pengawasan ketat terhadap pergerakan mafia pupuk subsidi yang selama ini meresahkan petani. Mafia pupuk biasanya bercokol di area distributor, penyalur dan area lain yang berkaitan dengan produksi.

ANGGOTA Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin mengatakan, dugaan adanya sindikat mafia pupuk subsidi ini sudah ada sejak lama.

"Namun, tindakan tegas yang membuat efek jera mereka masih belum terlihat di lapangan. Karena itu, praktik-praktik yang merugikan negara dan rakyat Indonesia ini masih terus berlangsung," ujar Andi Akmal, kemarin.

Andi Akmal mengatakan, langkanya ketersediaan pupuk subsidi diduga kuat karena ada yang bermain dengan menahan stok dan merusak distribusi. Akibatnya, harga di lapangan tinggi hingga berada di atas harga

eceran tertinggi (HET).

"Saya melihat, sosialisasi digitalisasi kios resmi pupuk subsidi juga masih kurang. Terutama digitalisasi di daerah yang kurang akses jaringan internet," kata anggota dari Fraksi PKS ini.

Ketua Kelompok Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Yadi Sofyan Noor meminta pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan dengan terstruktur. Menurutnya, keberpihakan Pemerintah terhadap petani saat ini perlu didorong kembali.

"Kita punya cita-cita swasembada, tapi perlu dukungannya buat petani. Menteri Keuangan bantu dong petani kita. Tidak cukup

hanya Mentan yang jungkir balik pikir petani. Tapi dukungan anggarannya dilemahkan," katanya.

Sofyan mengaku, distribusi pupuk bersubsidi yang kerap bermasalah di tingkat lapangan, tidak lepas dari lemahnya pengawasan komisi pengawas pupuk di daerah dan pupuk Indonesia.

"Saya meragukan komitmen Pemerintah Daerah untuk membantu petaninya. Mestinya data penerima pupuk dan penyalurannya klir di tingkat bawah. Jangan kalau ada masalah dilempar ke pusat. Bantu dong petani kita," tegasnya.

Akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB) Prima Gandhi menilai, Pemerintah telah bekerja optimal mengawal ketat kebijakan mengawal pupuk bersubsidi langsung ke petani. Tak kurang setiap tahunnya Pemerintah menggelontorkan 9 juta ton pupuk subsidi bagi petani.

Ini menunjukkan bentuk keseriusan Pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.

"9 juta ton pupuk subsidi ini cukup besar dan tentu mendistribusikan ini bukanlah perkara mudah, apalagi di saat pandemi Covid-19," terang Gandhi.

Gandhi mengatakan, penyediaan pupuk ini merupakan program strategis lintas kementerian, yakni Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian BUMN.

Dalam tata kelolanya melibatkan Pemerintah Daerah, serta pengawasan dan penindakannya juga melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3).

Sayangnya, walau 9 juta ton ini terbilang cukup besar, namun

sebenarnya masih jauh dari kebutuhan petani yang diperkirakan mencapai 35 juta ton.

"Jadi ya pasti ada gula, ada semut. Artinya, ada moral hazard di lapangan. Tapi ini tidak luput dari pengawasan pemerintah," sambung Gandhi.

Dia menjelaskan, pelaksanaan program pupuk bersubsidi yang dijalankan Pemerintah hingga saat ini sudah sangat bagus. Kemenkeu menyiapkan anggaran, Kementerian BUMN menyiapkan produksi pupuk hingga distribusinya ke petani melalui PT Pupuk Indonesia sebagai pelaksananya.

"Tata kelola program pupuk subsidi ini juga sudah berbasis digital, sehingga jelas sasaran yakni petani, yang berhak mendapatkan bantuan, daftar kios dan distributor juga sudah jelas," pungkasnya. ■ KAL